



**PENGAMBILAN KEBIJAKAN RASIONAL OLEH PEMERINTAH TINGKOK
TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG 2014 - 2019**

Fatimatuh Zahrah, Reni Windiani

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In 2014 an act of terror shocked Chinese citizen. After investigation, it was found that this crime was committed by few Uighurs' descendants. This situation had made China strengthened its national security by implementing Strike Hard Against Extremist Terrorism and Reeducation Policies in Xinjiang which predominantly inhabited by Uighurs. At first both policies were directed to maintain Chinese national security, but the aim shifted when China launched One Belt One Road program and fortifying its control in Xinjiang in order to maximize economic beneficial. This research use literature review as data gathering technic complemented by Decision Making Theory and National Security Concept to explain the reason of Chinese Government policy toward the Uighurs. The act of terror in 2014 who committed by few Uighurs' triggered President Xi Jinping to focusing in security sector in order to maintain national stability. Decision to enforce Strike Hard Against Extremist Terrorism and Reeducation Policies at first intended to maintain security and educate the people shifted as One Belt Road commenced. Chinese government sacrifices Uighurs in order to maximize national economic benefits.

Keywords: *Uighur, Strike Hard Against Extremist Terrorism, One Belt One Road, Xinjiang, teror*

PENDAHULUAN

Tiongkok adalah negara yang memiliki sejarah multikulturalisme yang tinggi, namun hubungan antara budaya-budaya ini tidak begitu harmonis. Demikian juga pertentangan yang kerap kali terjadi menyebabkan masyarakatnya masih terkotak-kotakkan. Penelitian ini berfokus pada salah satu etnis minoritas yang ada di Tiongkok, yaitu etnis Uighur. Etnis Uighur merupakan etnis keturunan klan Turki yang hidup di Asia Tengah dan paling banyak tinggal di Xinjiang. Etnis Uighur telah tinggal di Uighuristan lebih dari 2.000 tahun lalu, kemudian Tiongkok mengklaim daerah tersebut sebagai warisan sejarahnya dan oleh karenanya tak dapat dipisahkan dari Tiongkok (Ariefyanto, 2012). Daerah ini berbatasan dengan Kazakstan, Mongolia di timur laut, Kirghiztan dan Tajikistan di barat laut, dan dengan Afghanistan-Pakistan di barat daya. Seiring perkembangan zaman, wilayah Xinjiang menjadi tempat ketegangan antara dua suku besar yaitu etnis Han asli Tiongkok dan etnis Uighur.

Pada tahun 2008, sekitar seribu orang warga Uighur berkumpul di ibukota regional Urumqi untuk menyerukan penyelidikan pemerintah terhadap perkelahian yang terjadi di sebuah pabrik mainan di Guangdong yang mana telah menewaskan dua warga Uighur (Hurd, 2018). Setelah kejadian kerusuhan tersebut, pemerintah Tiongkok merespon dengan memblokir akses internet ke daerah itu selama sepuluh bulan. Tidak hanya itu saja, pada tahun 2014 terjadi pula konflik di Tiongkok yang pelakunya adalah kelompok separatis Uighur. Kelompok tersebut memprakarsai serangan di Stasiun Kereta Api Kunming dan menikam tiga puluh tiga warga sipil (Hurd, 2018). Merespon kejadian tersebut, pemerintah daerah Xinjiang menyerukan kampanye baru yaitu “*Strike Hard Against Violent Extremism*” yang bertujuan untuk mengerahkan kontrol yang lebih besar terhadap penduduk Uighur. Selanjutnya program tersebut terus mengalami peningkatan secara dramatis hingga Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo mengambil alih kepemimpinan Xinjiang.

Hubungan antara pemerintah Tiongkok dengan etnis Uighur sangat dinamis. Eskalasi dan deskalasi ketegangan sering muncul di setiap periode pemerintahan pemimpin Tiongkok, hal yang

sama terjadi pada masa pemerintahan Xi Jinping. Namun pada pemerintahan Xi Jinping terjadi eskalasi ketegangan yang lebih besar karena kebijakan pemerintah Tiongkok. Hal ini menjadi pendorong penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab mengapa Tiongkok dibawah pemerintahan Xi Jinping menerapkan kebijakan *Strike Hard Against Extremism Terrorism* dan *Re-education Camp* terhadap etnis Uighur. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan *Decision Making Theory* menurut Graham T. Allison dan konsep Keamanan Nasional untuk menjelaskan penyebab fenomena yang telah terjadi antara etnis Uighur dan Pemerintah Tiongkok.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogyantari (2009) mengenai etnis Uighur di Tiongkok pada tahun 1949-2008 menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok sangat merugikan muslim Uighur sebagai ras keturunan Turki. Terlebih ketika etnis keturunan Turki yang lain telah terlepas dari hegemoni komunisme etnis Uighur masih belum dapat merdeka dari kekuasaan Tiongkok. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Edikreshna (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi konsep nasionalisme Tiongkok di era globalisasi terhadap minoritas etnis Uighur di Xinjiang pada periode 2001-2010 dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Terlihat pada saat pembentukan negara Tiongkok modern oleh Sun Yat-Sen yang banyak menggunakan prinsip-prinsip Barat. Lalu mengadopsi dan melakukan penyesuaian agar dapat sejalan dengan kondisi masyarakat Tiongkok dan diterapkan dalam konsep nasionalisme Tiongkok. Edikreshna juga menyimpulkan bahwa pemimpin Tiongkok berusaha membuat Tiongkok menjadi sebuah negara peradaban atau *civilizational state* yang membedakan Tiongkok dengan bangsa-bangsa lainnya.

Jika penelitian Yogyantari menggunakan sudut pandang hak *self-determination* etnis Uighur dan penelitian Edikreshna menggunakan sudut pandang Globalisasi dalam mendeskripsikan konflik antara pemerintahan Tiongkok dan etnis Uighur, penelitian ini berusaha menggunakan sudut pandang baru. Peneliti menggunakan teori *Rational Choice* dan konsep Keamanan Nasional dalam menjelaskan tindakan Tiongkok dalam penerapan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan *Camp Reeducation* terhadap etnis Uighur di Xinjiang pada tahun 2014. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan hal-hal apa saja yang mendasari kebijakan pemerintah Tiongkok dalam penerapan kebijakannya tersebut. Hingga tindakan Tiongkok terhadap warga negara di

wilayah kedaulatannya sendiri ini menjadi perhatian dunia. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya sudut pandang pengambilan kebijakan di Tiongkok terhadap etnis Uighur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka berbasis dokumen primer dan sekunder untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kongruen untuk menjelaskan kasus dengan sebuah teori yang dirasa mampu untuk menjelaskan kasus tersebut (George & Bennet, 2005).

PEMBAHASAN

Aksi Terorisme di Xinjiang

Daerah Otonomi Uighur Xinjiang terletak di barat laut Tiongkok, di pedalaman benua Eurasia dan berbatasan dengan delapan negara: Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India (Dwyer, 2005). Di daerah inilah Tiongkok kuno terhubung ke dunia, menjadikannya tempat pertemuan bagi banyak peradaban.

Orang-orang Uighur sebagian besar adalah penduduk desa yang menetap yang tinggal di jaringan oasis yang terbentuk di lembah dan lereng bawah Tien Shan, Pamir, dan sistem gunung terkait (Kamberi, 2015). Wilayah ini adalah salah satu yang paling kering di dunia. Karenanya, selama berabad-abad mereka telah mempraktikkan irigasi untuk menghemat pasokan air mereka untuk pertanian. Tanaman pangan utama yang dihasilkan adalah gandum, jagung, *kaoliang* (sejenis sorgum), dan melon (Kamberi, 2015).

Sejak awal tahun 2000 tindakan teror di dunia semakin marak begitu juga dengan Tiongkok yang menjadi salah satu negara yang tak terhindarkan dari aksi teror. Teror yang dilakukan di Tiongkok dilakukan oleh kelompok separatis yang disebut Gerakan Islam Turkestan Timur. Kelompok ini dan hubungannya dengan fundamentalisme muslim telah menambah kekhawatiran Tiongkok tentang meningkatnya ancaman terorisme di dalam negeri karena wilayah yang bergolak menghadapi serentetan serangan teroris pada tahun 2014 (CNN Indonesia, 2018).

Pemerintah Tiongkok mengumumkan pada Mei 2014 diberlakukan penumpasan keras terhadap aktivitas kekerasan teroris tepatnya setelah kejadian bom di Urumqi yang menewaskan 31 orang. Penangkapan dimulai pada bulan Juli dan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah semakin ketat. Pada awal Oktober, pihak berwenang memberlakukan larangan perjalanan di

Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, mencegah penduduk meninggalkan wilayah tersebut kecuali benar-benar diperlukan.

Kampanye *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dimulai ketika itu dan situasi di Tiongkok pun memanas bahkan menimbulkan respon dari dunia Internasional. Keberlanjutan dari kampanye tersebut adalah dengan mengurung orang-orang Uighur kedalam Kamp Reedukasi. Dalam kamp tersebut diterapkan sistem khusus yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok dengan anggapan sebagai cara untuk menertibkan situasi dan menjaga stabilitas ditengah gejolak konflik yang terjadi.

Tanggapan Pemerintah Tiongkok terhadap Aksi Teror di Xinjiang

Pada bulan Mei 2014, Pemerintah Tiongkok mengumumkan diberlakukannya penumpasan keras terhadap aktivitas kejahatan terorisme, tepatnya setelah kejadian bom di Urumqi yang menewaskan 31 orang. Aksi penangkapan dimulai pada bulan Juli, memperketat dan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah. Pada awal Oktober, pihak berwenang memberlakukan larangan perjalanan di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, mencegah penduduk meninggalkan wilayah tersebut kecuali benar-benar diperlukan. Keberlanjutan dari kampanye tersebut adalah dengan mengurung orang-orang Uighur kedalam Kamp Reedukasi.

Strike Hard Against Extremist Terrorism Campaign-Policy. Kampanye *Strike Hard* telah dilaksanakan semenjak tahun 1995 dengan menargetkan keagamaan illegal. Lalu beriringan dengan aksi teror yang terjadi di Tiongkok pada tahun 2014, kebijakan ini diperbarui dan penerapannya dilakukan dengan lebih ketat menjadi Kampanye *Strike Hard Against Extremist Terrorism* yang ditujukan untuk menghentikan gerakan separatis yang dapat membahayakan masyarakat Tiongkok.

Tiongkok telah menanggapi meningkatnya ancaman terorisme dengan modernisasi pasukan keamanannya dan peningkatan pengawasan terhadap kelompok etnis, politik, dan agama, serta melalui inisiatif pembangunan dan hukum seperti undang-undang anti-terorisme yang baru. Upaya anti-teror Tiongkok telah berkembang menjadi manajemen krisis preventif dan permanen. Dalam politik, anti-terorisme saat ini menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada bulan Agustus 2013, Dewan Negara membentuk *Leading Small Group on Counter-Terrorism*, yang merupakan badan tingkat atas yang bertugas memberi nasihat dan

melaksanakan pekerjaan kontra-terrorisme, yang dipimpin oleh menteri Keamanan Publik. Seiring dengan pembentukan Komisi Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Xi Jinping sendiri. Pada Januari 2014, hal ini menyebabkan sentralisasi dan prioritas pembuatan kebijakan anti-teror pada tingkat tertinggi. Banyak perubahan sejak saat itu bertujuan untuk meningkatkan mekanisme respons krisis, baik melalui peningkatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya, pelatihan khusus untuk pasukan kontra-terrorisme, dan perampingan rantai komando pasukan. Xi Jinping menyatakan bahwa untuk menstabilkan Xinjiang, jaring pengawasan negara perlu diperketat begitulah awal mula diperketatnya tindakan-tindakan keras terhadap Uighur yang sampai mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

"*Strike Hard Against Extremist Terrorism*" juga mencakup mobilisasi penduduk, termasuk Uighur, untuk membantu pihak berwenang memburu teroris dan menyampaikan informasi tentang tersangka dan terduga teroris. Selama tahun 2014, media non-pemerintah telah melaporkan peningkatan pengawasan terhadap minoritas Muslim di seluruh negeri, serta penahanan sewenang-wenang dan "pemulangan" paksa terhadap orang-orang Uighur yang tinggal di luar Xinjiang.

Tujuan eksplisit dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah untuk menyerang kekuatan musuh, memurnikan masyarakat, dan mengedukasi massa (Boehm, 2009, p.63). *Strike Hard Against Extremist Terrorism* juga mencakup mobilisasi penduduk, termasuk etnis Uighur, untuk membantu pihak berwenang memburu pelaku teroris dan menyampaikan informasi tentang tersangka dan terduga teroris. Meskipun upaya ini telah menunjukkan hasil positif, disisi lain upaya ini dikritik sebagai upaya asimilasi Uighur ke dalam mayoritas Han dengan artian untuk menghapus bahasa lokal, barang budaya, atau kehidupan beragama.

Reeducation Camp. Pada bulan Mei 2014, kamp reedukasi didirikan khusus untuk menahan orang-orang etnis Uighur di wilayah Xinjiang yang dianggap sebagai pelaku utama aksi terorisme, namun program ini beroperasi secara rahasia dan berada diluar sistem hukum. Kamp reedukasi ini menerapkan sistem khusus yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok dengan anggapan sebagai cara untuk menertibkan situasi dan menjaga stabilitas ditengah gejolak konflik yang sedang terjadi. Program ini mulai muncul ke hadapan publik pada tahun 2017, bahkan media lokal menyebut fasilitas tersebut sebagai pusat pelatihan kontra-ekstremisme dan pusat pelatihan pendidikan dan transformasi.

Pada tahun 2017 wilayah tersebut merupakan 21% dari semua penangkapan di Tiongkok meskipun terdiri dari kurang dari 2% dari populasi nasional, delapan kali lebih banyak dari tahun sebelumnya (Peter, 2018). Biro peradilan dan pemerintah lainnya di banyak kota dan kabupaten mulai mengeluarkan serangkaian tawaran pengadaan dan konstruksi untuk kamp dan fasilitas yang direncanakan tersebut. Semakin banyak, pusat penahanan besar-besaran dibangun di seluruh wilayah dan digunakan untuk menahan ratusan ribu orang yang menjadi sasaran praktik keagamaan dan etnis mereka.

Analisis Kebijakan Tiongkok terhadap Etnis Uighur di Xinjiang

Dalam menjelaskan perilaku Tiongkok yang diterapkan khususnya untuk Daerah Otonom Xinjiang Uighur, diperlukan alat untuk mengetahui apa saja hal-hal yang mendasari tindakan tersebut serta bagaimana pertimbangan Tiongkok dalam mengambil keputusan tersebut. Disini penulis menggunakan satu konsep dan satu teori untuk menemukan aspek-aspek dalam menemukan jawaban dari diambilnya kebijakan-kebijakan tersebut terhadap etnis Uighur.

Keamanan Nasional. Tiongkok memiliki persepsi mengenai keamanan nasionalnya yang terdiri dari tiga elemen yaitu: kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan (Ministry of National Defense of the People's Republic of China, n.d.). Tiongkok menganut otoritarian, dengan artian negara memiliki kekuasaan yang mutlak dan abadi, dimana negara tersebut diperintah oleh pemerintahan satu partai yaitu Partai Komunis Tiongkok. Kejadian teror yang terjadi di Urumqi pada tahun 2014 menjadi pemicu untuk Tiongkok dalam menindak tegas aksi terorisme. Aksi teror tersebut menimbulkan korban serta kekhawatiran masyarakat Tiongkok, sehingga harus pemerintah menindak secara tegas. Presiden Xi Jinping menanggapi situasi tersebut secara serius dan mengambil tindakan secara cepat untuk menangani hal tersebut dengan menerapkan *Strike Hard Against Extremist Terrorism*. Upaya keamanan dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti: jaringan pengawasan menggunakan pengenalan wajah, pengumpulan biometrik warga, pelacakan GPS kendaraan pribadi, dan *spyware smartphone* Uighur (Doyon, 2019).

Decision Making Theory. Graham T. Allison mengajukan tiga model pengambilan keputusan tetapi penulis hanya menggunakan salah satu model yaitu model *Rational Actor*. Dalam model *Rational Actor*, pembuatan keputusan digambarkan sebagai suatu proses intelektual

dimana pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah berpusat kepada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu negara, alternatif-alternatif juga perlu disiapkan sebagai pertimbangan karena semua keputusan berdasarkan pada untung rugi yang didapatkan. Dalam pidatonya dalam Konferensi Kerja Diplomasi Periferal di Beijing pada tanggal 24 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa negara-negara yang berbatasan dengan Tiongkok memiliki arti strategis yang penting bagi pembangunan Tiongkok, baik secara letak geografis maupun sumber daya alam. Presiden Xi juga menekankan bahwa perbatasan Tiongkok memiliki kekuatan besar dan memiliki keuntungan serta potensi pembangunan yang hebat (Xinhua News, 2013).

Dengan menggunakan model *Rational Actor*, penjelasan mengenai pengambilan kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok dapat digambarkan lebih lanjut dengan beberapa tahap, antara lain:

- 1) **Tujuan.** Tiongkok menerapkan pembangunan di daerah Xinjiang dengan harapan akan menjadi solusi bagi masalah perekonomian dan sosial yang terjadi di Xinjiang karena pada dasarnya wilayah tersebut memiliki sumber daya alam berlimpah. Sebelum menerapkan kebijakan, Tiongkok sudah memiliki tujuan untuk menjaga keamanan negaranya serta keamanan menjadi fokus utama yang dikatakan Presiden Xi Jinping sejak dia menjabat menjadi pemimpin Tiongkok. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan dalam dan luar negeri. Keamanan dalam negeri dianggap Tiongkok terbebas dari aksi separatis, ekstremis, dan teror. Terusan dari inisiasi menjaga keamanan yang dimaksud oleh Presiden Xi Jinping membentuk *One Belt One Road*, pembangunan ekonomi Tiongkok membantu menjaga keamanan kawasan di sekitar Tiongkok. Program ini dilakukan dengan membuat infrastruktur berkelanjutan dan inisiatif untuk menghubungkan Tiongkok melalui investasi ke negara-negara tetangga juga Eurasia. Rangkaian proyek ini, yang diumumkan pada tahun 2013, mewakili proyek-proyek yang saat ini bernilai USD 890 miliar dan dengan perkiraan total investasi sekitar USD 4 triliun dari pihak Tiongkok (OECD, 2018);
- 2) **Alternatif.** Xi Jinping memiliki versi berbeda dalam menjaga keamanan dan menangani aksi teror di Tiongkok dengan pemimpin sebelumnya Hu Jintao. Presiden Xi Jinping yang menindak keras tindakan separatis menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya dalam menangani permasalahan separatis, ekstremis, dan teror. Presiden Hu Jintao sudah lebih dulu menggunakan strategi kerja sama kawasan yang digunakan Tiongkok bersama dengan lima negara dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai dalam menangani aksi separatis di Xinjiang berkenaan dengan prinsip dunia harmonis yang dia pegang. Pada masa pemerintahan Hu Jintao, ditekankan mengenai pentingnya penggunaan kerja sama multilateral dalam menciptakan kestabilan

keamanan demi terciptanya dunia yang harmonis. 3) **Konsekuensi.** Penerapan kebijakan Tiongkok yaitu *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan Kamp Reeducasi digunakan untuk menertibkan dan menjaga keamanan wilayah Xinjiang berakibat terlaksananya program *One Belt One Road* dengan baik yang berdampak baik bagi perekonomian negara. Namun disisi lain kecemasan internasional dilemparkan oleh negara-negara Barat yang melihat program Tiongkok di wilayah Xinjiang terlalu membatasi individu, Marc Julienne dan Moritz Rudolf telah mencatat bahwa antara 2010 dan 2014 serangan teroris baik di Xinjiang atau terkait dengan wilayah tersebut, seperti serangan stasiun kereta api Kunming 1 Maret 2014 sampai merenggut nyawa 468 orang dan melukai 548 lainnya. Kejadian sejenis ini telah mendorong pemerintah untuk membentuk Kamp Reeducasi dalam upaya untuk membendung tindakan yang mengganggu pengoperasian program *One Belt One Road* sendiri. Sehingga dalam perkembangannya Xinjiang semakin disusupi oleh berbagai alat kontrol politik dan sosial Tiongkok. Dengan diberlakukannya *Strike Hard* dan Kamp Reeducasi, dianggap bagi Tiongkok semakin memudahkan pembatasan pada kemungkinan aksi teror maupun tindakan separatistis. Sejak 2013, Xinjiang telah menerapkan langkah-langkah untuk memastikan pengawasan komprehensif di wilayah Xinjiang dengan mayoritas Uighur melalui peningkatan patroli polisi di lingkungan Uighur, pemasangan sistem pengawasan elektronik *skynet* Tiongkok, pemasangan pelacak GPS di semua kendaraan bermotor, dan penyediaan DNA sampel dan data biometrik untuk paspor. Sentralitas Islam yang berkelanjutan terhadap identitas Uighur juga telah diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk stabilitas dan keamanan negara. Kegiatan yang berkaitan dengan perilaku keagamaan dipantau secara lebih sistematis sebagai bentuk penekanan khususnya terhadap etnis Uighur yang mayoritas merupakan muslim. Sistem pengawasan yang diperluas ini juga telah didukung dengan kekuatan, yang ditampilkan paling terang-terangan melalui pelaksanaan unjuk rasa massa anti-terrorisme oleh petugas keamanan dan peningkatan kemampuan pasukan keamanan termasuk pengerahan drone; 4) **Pilihan.** Tiongkok sebagaimana negara otoritarian, akan melakukan apapun untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan, terutama berkaitan dengan topik yang ditulis yaitu pada Daerah Otonomi Xinjiang Uighur dalam usaha menghilangkan tindak teror maupun separatistis di dalam negeri dan menjaga keamanannya. Tiongkok menerapkan Kebijakan *Strike-Hard* dan kamp-kamp reeducasi sebagai pilihan tegas Presiden Xi Jinping. Meskipun wilayah Xinjiang memiliki potensi besar tetapi sejak 1990-an Xinjiang juga menjadi sumber utama terrorisme di Tiongkok. “Aspirasi menuju otonomi

yang lebih besar atau kemerdekaan langsung tidak pernah jauh dari permukaan kehidupan politik di provinsi ini” dikatakan oleh Andrew Small, seorang ahli hubungan Tiongkok-Pakistan terkemuka. Penyebaran islamisme radikal di Xinjiang menambah kompleksitas situasi yang sudah tegang. Partai Komunis yang berkuasa menganggap gerakan separatis Xinjiang sebagai ancaman eksistensial terhadap negara. Lalu pada masa Pemerintahan Presiden Xi Jinping kerusuhan kembali terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Tiongkok dengan adanya aksi teror yang menimbulkan korban. Sebagai bentuk aksi tegas dalam menangani permasalahan besar di awal pemerintahannya, Presiden Xi Jinping langsung menerapkan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan membuat kamp-kamp reedukasi sebagai tempat untuk mendidik ulang etnis Uighur yang dianggap mengancam. Mengingat dengan adanya aksi teror yang semakin marak akan menimbulkan dampak beruntun seperti pada aspek keamanan yang mana menjadi fokus pemerintahan pada masa Presiden Xi Jinping.

KESIMPULAN

Pada tahun 2014, Presiden Xi Jinping memberlakukan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan Kamp Reedukasi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Kebijakan ini diterapkan secara keras dan tegas karena Tiongkok ingin menghentikan keresahan yang terjadi di masyarakat dan menertibkan negaranya. Penyebab utama keresahan ini karena terjadi tindakan teror pada bulan Mei tahun 2014 yang didalangi oleh kelompok separatis Uighur.

Tiongkok mengambil tindakan tegas dengan menerapkan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan membuat kamp-kamp reedukasi sebagai tempat untuk pendidikan ulang bagi etnis Uighur dan muslim yang bertempat tinggal di daerah Xinjiang. Pemilihan mengenai siapa yang dimasukkan ke dalam kamp ditentukan pemerintah secara acak. Upaya ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk menjaga keamanan negaranya dari aksi teror maupun separatis sekaligus penertiban wilayahnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, fungsi penerapan kebijakan *Strike Hard* dan Kamp Reedukasi menjadi bias dan bahkan menimbulkan korban atas penerapan sistem baru yang beberapa kali terbukti berlangsung secara tidak manusiawi. Korban utama demi mencapai tujuan Tiongkok adalah etnis Uighur di Xinjiang. Persepsi keamanan, kedamaian, dan ketertiban yang ingin dicapai Tiongkok berkaitan dengan kepentingan negara diatas segala-galanya mengingat Tiongkok merupakan negara otoriter. Keamanan yang dimaksudkan pada awalnya untuk menepis aksi teror di Tiongkok tetapi mengingat Xinjiang, yang

menjadi pusat tempat tinggal mayoritas etnis Uighur tinggal merupakan wilayah yang potensial, Tiongkok pun menerapkan *Strike Hard* dan kamp reedukasi dengan dimaksudkan menjaga kestabilan keamanan kawasannya juga.

Berdasarkan data yang penulis temukan serta konsep dan teori yang digunakan, penulis menemukan bahwa pada awalnya Tiongkok menerapkan kebijakan tersebut untuk mencapai negara yang aman berdasarkan versi aman dibawah pemerintahan Presiden Xi Jinping. Keamanan yang dimaksud sejalan dengan kepentingan negara. Seiring dengan berlangsungnya waktu, penerapan kebijakan yang seharusnya menjaga keamanan berakhir menjadi tindakan semena-mena. Tujuan Tiongkok diselubungi dengan niat menertibkan masyarakat Uighur, khususnya di Xinjiang, agar terkontrol dan kooperatif dengan tujuan lain yaitu mengembangkan program *One Belt One Road*. Program *One Belt One Road* sendiri berfokus kepada pembangunan dan berpotensi memberikan keuntungan maksimal dari segi ekonomi untuk Tiongkok serta menstabilkan keamanan kawasan diluar Tiongkok melalui kerja sama dengan banyak negara disekitarnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S serta Ibu Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing. Kemudian terima kasih kepada Bapak Muhammad Arief Zuliyah, S.IP., LL.M dan Ibu Anjani Tri Fatharani, S.IP, M.A selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Allison, G. T. (1999). *Essence of Decision*. Longman.

(2014). *China's Commitment to Peaceful Development*.

(2021). *China's political system and the extent of democratic participation*. BBC.

CNN Indonesia. (2018, 12 18). *Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218161340-113-354593/jejak-konflik-etnis-uighur-dan-pemerintah-china>

- Doyon, J. (2019). *'Counter-Extremism' In Xinjiang: Understanding China's Community-Focused Counter-Terrorism Tactics*. War On Rocks.
- Edikreshna, N. N. (2012). Implementasi Konsep Nasionalisme China Di Era Globalisasi Terhadap Etnik Minoritas Uighur di Xinjiang pada Tahun 2001-2010. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Hurd, H. (2018, Oktober 9). *China's Human Rights Abuses Against Uighurs in Xinjiang* . Retrieved from Lawfare: https://www-lawfareblog-com.translate.google/chinas-human-rights-abuses-against-uighurs-xinjiang?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- Ministry of National Defense of the People's Republic of China. (n.d.). *Defense Policy*. Retrieved from Ministry of National Defense of the People's Republic of China: <http://eng.mod.gov.cn/defense-policy/index.htm>
- OECD. (2018). *China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape*. OECD BUSINESS AND FINANCE OUTLOOK 2018.
- Peter, T. (2018). *“Break Their Lineage, Break Their Roots”*. China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims.
- (2021). *The National People's Congress of the People's Republic of China*. NPC.
- (2019). *The State Council*. NPC.
- Xinhua News. (2013, October 26). *Xi Jinping: China to further friendly relations with neighboring countries*. Retrieved from People's Daily Online: <http://en.people.cn/90883/8437410.html>
- Xu, B., Fletcher, H., & Bajoria, J. (2014). *The East Turkestan Islamic Movement*. Council of Foreign Relations.
- Yogyantari, I. (2009). Muslim Uyghur Di Propinsi Xinjiang Pada Masa Pemerintah Komunis China. *Skripsi*.